
Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran Terhadap PDRB Melalui Kriminalitas Di Indonesia

Wahyu AtthorIQ¹⁾
Universitas Bengkulu
wahyuatthorIQ@gmail.com¹⁾

Septriani Septriani²⁾
Universitas Bengkulu²⁾
septriani@unib.ac.id^{2)*}

Etik Winarni³⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi³⁾
etikwinarni88@gmail.com³⁾

*corresponding Author : septriani@unib.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan strain theory yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dalam Clara (2023), adanya ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan dan kemampuan individu untuk mencapainya dapat menciptakan ketegangan atau tekanan (ketegangan) yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kriminalitas dari sudut pandang ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung digunakan analisis jalur. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di Indonesia, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Indonesia, pengangguran berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia, ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap PDRB di Indonesia, kriminalitas memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB di Indonesia, pengangguran tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap PDRB melalui kriminalitas sebagai intervening variable, dan ketimpangan Pendapatan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui kriminalitas sebagai intervening variable. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pemerintah bisa mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan PDRB di Indonesia dengan cara menurunkan ketimpangan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Novelty Penelitian ini belum ada satu penelitian yang mengkaji tentang kriminalitas disepuluh Provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia serta metode penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Kata kunci : Kriminalitas; PDRB; Ketimpangan Pendapatan; Analisis Jalur; Pengangguran

PENDAHULUAN

Kriminalitas adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan kekerasan, pencurian, penipuan, atau tindakan merugikan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian pada individu, kelompok, atau masyarakat secara umum (W.Sherman et al., 2002). Hal ini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk negara

Indonesia. Kriminalitas ini berdampak pada luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Menurut teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton teori ini berpendapat bahwa ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan dan kemampuan individu untuk mencapainya dapat menciptakan ketegangan atau tekanan (strain) yang mendorong individu terlibat dalam perilaku tindak kejahatan (Deflem, 2017).

Terdapat banyak faktor yang bisa memicu terjadinya kriminalitas. Seperti yang disampaikan oleh Kartono (2011), bahwa kriminalitas disebabkan oleh faktor biologis, sosiologis dan faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu dari faktor tersebut. Menurut Todaro dan Smith (2015), hak akses seseorang Terhadap fasilitas yang bisa meningkatkan kesejahteraannya akan semakin jauh seiring dengan semakin miskin kondisi orang tersebut. Hal ini kemudian yang memicu tingginya peluang untuk melakukan tindakan kriminal guna bertahan hidup.

Adapun salah satu parameter untuk melihat kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah atau daerah ayitu dengan melihat PDRB yang dimiliki wilayah tersebut. Menurut Sasana (2006), PDRB adalah nilai akhir dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode 1 tahun. Dimana PDRB semakin tinggi maka potensi peningkatan pendapatan daerah juga akan semakin meningkat (Simanjuntak, 2001).

Berdasarkan Teori Disorganisasi sosial D. McKay tahun 1942 (Weis et al., 1996) yang menyatakan bahwa apabila kondisi ekonomi suatu masyarakat tergolong lemah di mana mengakibatkan tingkat kriminalitas tinggi, terdapat keragaman yang luas dalam norma dan standar perilaku. Hubungan antara PDRB dan kriminalitas dapat dibuktikan pada penelitian Khairani (2019) yang menyatakan bahwa kriminalitas menghambat pembangunan ekonomi. Selaras dengan penelitian Dewantoro (2022) dimana PDRB berpengaruh terhadap kriminalitas pada tingkat $\alpha = 0,01$.

Pengangguran dapat menciptakan tekanan ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang dapat memicu individu untuk mencari cara alternatif untuk memperoleh sumber daya, termasuk melalui perilaku kriminal (Merton, 1968) dalam Deflem, 2017 . Dengan semua faktor yang ada, penurunan pendapatan dan penurunan potensi penghasilan yang terjadi akibat pengangguran yang terjadi secara tidak sukarela akan meningkatkan aktivitas ilegal yang memiliki hasil yang lebih relatif (Catheryne dan Rudolf, 2017). Hubungan antara pengangguran dan kriminalitas ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Fachrurrozi, dkk (2021), yang menemukan bahwa

pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap kriminalitas. Pada teori hukum okun yang menjelaskan terkait hasil produksi suatu negara yang mengalami peningkatan akan berdampak pada kesempatan kerja. Apabila kesempatan kerja meningkat maka pengangguran akan menurun karena produktivitas tenaga kerja meningkat (Okun, 1962)

Teori Strain oleh Robert K. Merton (1968) dalam Deflem, M. (2017) menjelaskan bahwa pengangguran dapat menciptakan tekanan ekonomi dan sosial pada individu, mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menjelaskan bagaimana pengangguran dapat berkontribusi pada peningkatan kriminalitas, yang kemudian dapat memengaruhi PDRB melalui penurunan stabilitas dan iklim investasi ekonomi. Basuni (2022), juga menemukan hasil pada saat pengangguran terbuka relative tinggi, maka kriminalitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun ketika pengangguran rendah, maka kriminalitas tidak begitu berbahaya bagi perekonomian.

Ketimpangan pendapatan, yaitu kesenjangan yang signifikan antara pendapatan individu atau kelompok dalam masyarakat, dapat menciptakan ketidakpuasan, frustrasi, dan perasaan ketidakadilan. Hal ini dapat mendorong individu untuk mencari cara alternatif untuk meraih keadilan ekonomi, yang dalam beberapa kasus dapat melibatkan perilaku kriminal (Merton, 1968) dalam Deflem, 2017. Menurut Wilkinson & Pickett (2006), negara yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tinggi, memiliki kecenderungan tingkat kriminalitas yang tinggi juga. Hal ini dapat dibuktikan oleh Pratama (2020), bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan dan menunjukkan hubungan yang positif terhadap kriminalitas. Hubungan ini menjelaskan jika ketimpangan pendapatan meningkat maka kriminalitas akan meningkat pula. Hal tersebut dikarenakan semakin melebarnya tingkat ketimpangan pendapatan akan memicu kecemburuan sosial sehingga akan menjadi intensif kegiatan kriminalitas.

Teori Becker (1968) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi kriminalitas. Individu cenderung memilih perilaku kriminal ketika merasa ekonomi terpinggirkan. Tingkat kenaikan PDRB yang kuat dapat mengurangi kriminalitas dengan meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan, sehingga individu lebih memilih jalur legal. Seperti temuan Lahouij (2017), bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang menyebabkan buruknya kesehatan masyarakat dan peningkatan tingkat kejahatan, yang semuanya memberikan beban pada perekonomian. Begitupun menurut Septriani (2023), kemiskinan

tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, tapi juga memunculkan kerentanan terhadap tindakan kriminal.

Tabel 1. Tingkat Kriminalitas, Pengangguran, PDRB, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2016-2021

Tahun	PDRB	Pengangguran	Gini Ratio	Kriminalitas
2016	47 937,72	5,61	0,394	357.197
2017	51 891,18	5,50	0,391	336.652
2018	55 992,07	5,30	0,384	294.281
2019	59 317,91	5,23	0,380	269.324
2020	57 289,59	7,07	0,385	247.218
2021	40 780,31	6,49	0,381	239.481

Sumber: data diolah 2023

Selama tahun 2016-2021, terjadi perubahan pada pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kriminalitas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa pada tabel, ke tiga variabel ini mengalami peningkatan maka akan menurunkan PDRB, namun pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* untuk seluruh rakyatnya yang mengharuskan warganya untuk tidak keluar rumah selama masa pandemi sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan ketimpangan pendapatan namun kriminalitas menurun. Novelty Penelitian ini belum ada satu penelitian yang mengkaji tentang kriminalitas di sepuluh Provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia serta metode penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari publikasi BPS (Badan Pusat Statistik) dan berupa data panel. Adapun sampel penelitian ini terdiri dari 10 Provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Aceh dan Riau (Badan Pusat Statistik, 2022). Penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas dan pengaruh pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kriminalitas terhadap PDRB di Indonesia periode 2012-2021. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun model atau persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

.....[1]

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dibentuk persamaan struktural I berikut.

Persamaan Struktural I.

$$\beta_3 LNK_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNPGR_{it} + \beta_2 KP_{it} + \varepsilon_{it}$$

.....[2]

Persamaan Struktural II

$$\beta_4 LNPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNPGR_{it} + \beta_2 KP_{it} + \beta_3 LNK_{it} + \varepsilon_{it}$$

.....[3]

Dimana :

PDRBadalah Produk Domestik Regional Bruto

PGR adalah Pengangguran

KP adalah Ketimpangan Pendapatan

K adalah Kriminalitas

β_0 adalah Intercept/Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah koefisien regresi

i adalah unit *cross section* (10 Provinsi dengan tingkat criminal tertinggi)

t adalah periode waktu (2017-2021)

ε adalah *Error term*

selanjutnya dalam analisis data panel, dilakukan tiga pengujian dalam memperoleh model terbaik antaran model *common effect*, model *fixed effect* dan model *random effect* model dengan melakukan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier (Widarjono, 2009)

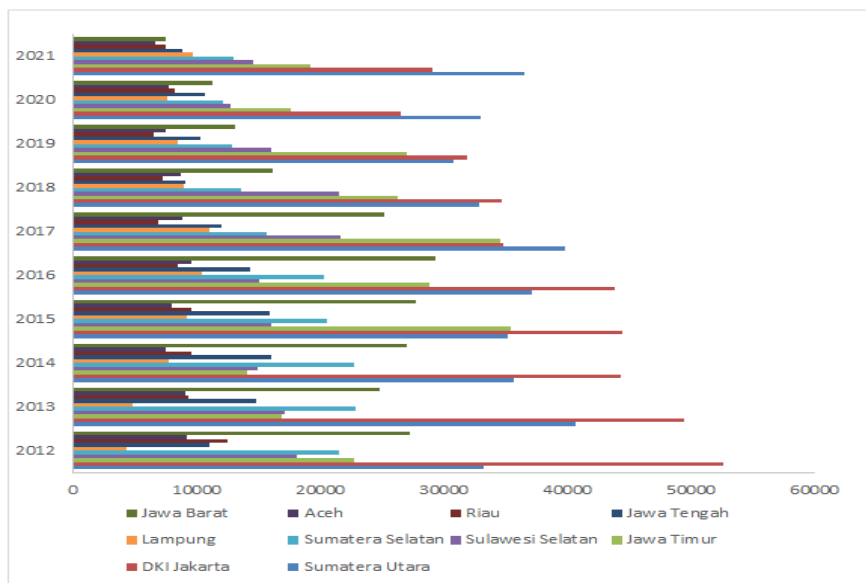
HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Kriminalitas di Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tindakan kriminalitas merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Tindak kriminalitas masih sering terjadi di seluruh provinsi Indonesia dimana hampir setiap berita di media tv, koran, internet memberitakan tentang tindakan kriminalitas. Sehingga kriminalitas menjadi permasalahan yang belum bisa kita hindari. Keadaan kriminalitas di Indonesia selama masa covid-19 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 terjadi tindak

kejahatan sebesar 247.218 kasus kejahatan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 8,21% dari tahun 2019 yang berjumlah 269.324 kasus. Pada tahun 2019 dalam 1 menit 47 detik terjadi tindak kriminalitas di Indonesia namun pada tahun 2020 dalam 2 menit 07 detik terjadi tindak kriminalitas di Indonesia.

Interval crime clock yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun. Indikator yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah dalam waktu tertentu yaitu menggunakan *crime rate*. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.



Grafik 1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda/Provinsi Pada 10 Provinsi dengan tingkat Kriminalitas Tertinggi 2012-2021

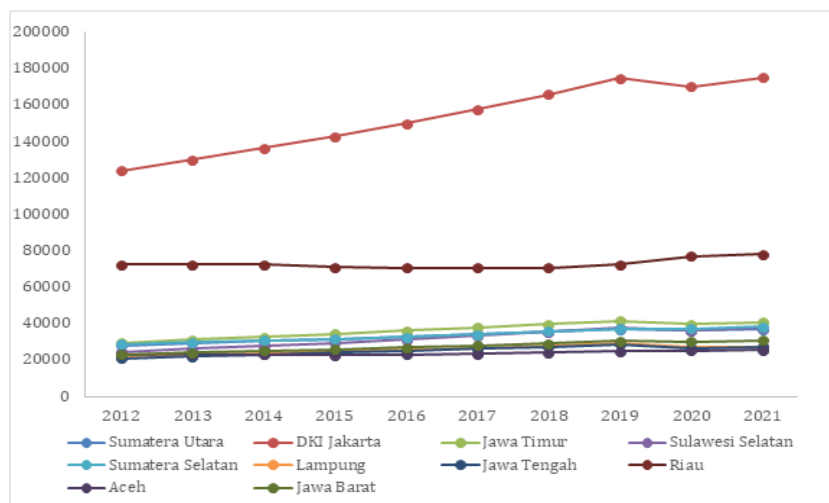
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Berdasarkan Grafik 1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2012-2021, tindakan kriminalitas yang berkisar dibawah 10.000 sampai diatas 50.000 kasus, dengan rata-rata angka kriminalitas tertinggi adalah DKI Jakarta. Sementara pada tahun 2021, tingkat kriminalitas paling tinggi terdapat di provinsi Sumatera Utara dengan kriminalitas berjumlah 32.990 kasus dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 36.534. Namun DKI Jakarta mengalami penurunan tingkat kriminalitas pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena terbatasnya gerak para pelaku tindak kriminal untuk melakukan aksinya, dikarenakan pembatasan gerak dan WFH untuk mengatasi pandemi Covid-19 pada tahun tersebut. Sedangkan untuk tingkat kriminalitas terendah terdapat pada

provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 718 kasus pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 850 kasus.

Keadaan PDRB di 10 Provinsi Dengan Tingkat Kejahatan Tertinggi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi. Pada Grafik 2 menunjukkan PDRB pada 10 provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia mengalami peningkatan namun dari meningkatnya PDRB setiap provinsi belum dapat menekan angka kriminalitas yang seharusnya pertumbuhan ekonomi mampu mengatasi meningkatnya tindakan kriminalitas. Pada grafik diatas provinsi yang memiliki PDRB tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta yang memiliki rata-rata meningkatnya PDRB 1,86 Kuadriliun pada tahun 2021.

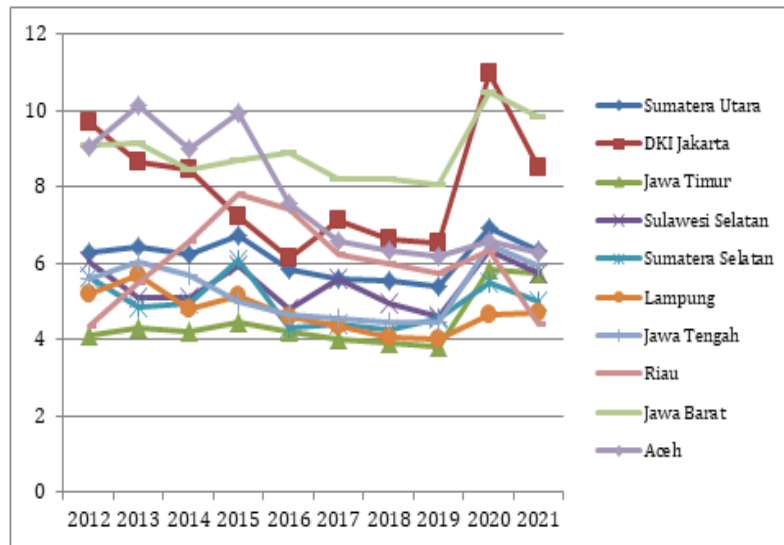


Grafik 2. PDRB pada 10 Provinsi dengan Kriminalitas Tertinggi

Sumber : BPS (2023)

Keadaan Pengangguran di Indonesia

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka pada 10 provinsi dengan tingkat kejahatan paling tinggi di Indonesia selama tahun 2020 mengalami trend peningkatan. Hal ini dikarenakan pandemi yang mengharuskan perusahaan melakukan PHK masal untuk dapat bertahan di masa Covid-19. Sehingga mengakibatkan semua karyawan menjadi pengangguran tidak sukarela. namun sangat disayangkan angka kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta pun juga tinggi.

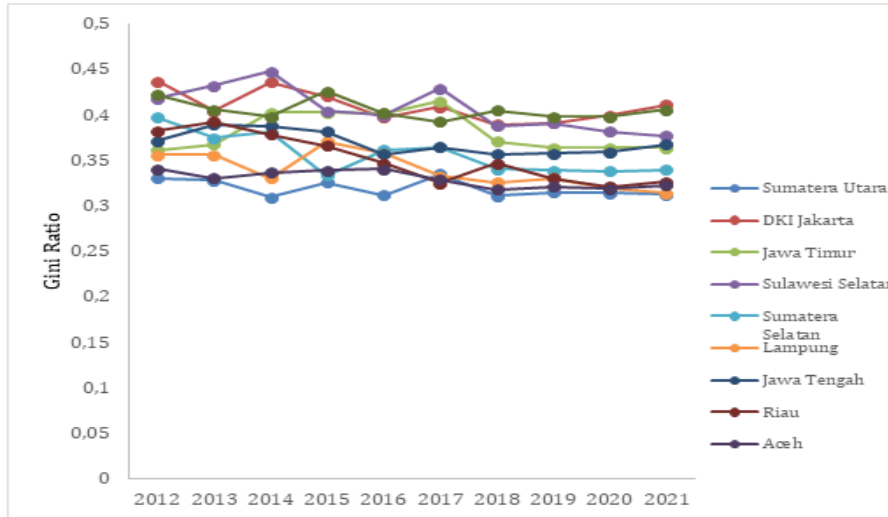


Grafik 3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2012-2021
Sumber : BPS (2023)

Berdasarkan Grafik 3, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang tinggi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Kenaikan pengangguran Indonesia cukup tinggi sehingga memerlukan kebijakan yang berorientasi kepada penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah secara merata. Supaya, tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap kesejahteraan dan berpotensi meningkatkan kejahatan (Azharini, 2019).

Kedaaan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Tingkat ketimpangan pembagian pendapatan yang relatif antar penduduk di suatu negara atau wilayah biasanya diukur dengan menggunakan suatu alat ukur yang salah satunya, yaitu berupa koefisien gini.



Grafik 4. Perkembangan Gini Ratio

Pada 10 Provinsi Dengan Tingkat Kejahatan Tertinggi Di Indonesia Tahun 2012-2021

Sumber : BPS (2023)

Berdasarkan Grafik 4, indeks ketimpangan pendapatan pada provinsi dengan angka kriminalitas tertinggi cenderung fluktuasi. Pada grafik tersebut provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi selama kurun waktu 2012 hingga 2018 yaitu provinsi Sulawesi Selatan dengan rata-rata sebesar 0,4%. Namun pada tahun 2019 sampai 2021 DKI Jakarta memiliki ketimpangan tertinggi. Menurut Khoiri *et al* (2022) peningkatan gini ratio Indonesia di tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat pemerataan pengeluaran masyarakat Indonesia tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengalami penurunan karena adanya ketimpangan pendapatan yang cukup nyata di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian pada sub struktural I dan II yang dilakukan pada Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk memilih model terbaik. Adapun model terbaik yang terpilih adalah REM.

Tabel 2. Hasil REM Sub Struktural I.

Var	Coeff	Std. Err	t-Stat	Prob
Const	8.249040	0.587636	14.03768	0.0000
LNPGR	-0.320212	0.175186	-1.827845	0.0706
KP	5.464148	1.379711	3.960357	0.0001

Sumber: Eviews12, data diolah

Berdasarkan Tabel 2, hasil perhitungan model regresi random effect model diperoleh persamaan regresinya dan diinterpretasikan sebagai berikut:

$$K = 8.249040 - 0.320212 \text{ LNPGR} + 5.464148 \text{ KP}$$

- Jika semua variabel independen (Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan) diasumsikan bernilai nol atau konstan, maka besarnya tingkat Kriminalitas antar 10 provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia sebesar 8.249040.
- Nilai koefisien pengangguran yaitu -0.320212 maka bisa diartikan bahwa setiap terjadinya kenaikan Pengangguran maka Kriminalitas di 10 provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi mengalami penurunan sebesar -0.32 persen.
- Nilai koefisien Ketimpangan Pendapatan yaitu 5.464148 maka bisa diartikan bahwa setiap variabel Ketimpangan Pendapatan meningkat maka variabel Kriminalitas akan naik sebesar 5.46 persen.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada uji chow dan Hausman sub struktural II, model terbaik yang dipilih adalah Random effect model (REM).

Tabel 3. Hasil REM pada Sub Struktural II.

Var	Coeff	Std. Err	t-Stat	Prob
C	10.58318	0.550541	19.22323	0.0000
LNPGR	-0.129243	0.064469	-2.004735	0.0478
KP	-0.912264	0.199604	-4.570360	0.0000
LNK	-0.076027	0.037377	-2.034075	0.0447

Sumber: *Eviews12, data diolah*

Berdasarkan Tabel 3 hasil perhitungan model regresi random effect model diperoleh persamaan regresinya dan diinterpretasikan sebagai berikut:

$$PDRB = 10.58318 - 0.129243 \text{ LNPGR} - 0.912264 \text{ KP} - 0.076027 \text{ LNK}$$

- Nilai konstanta yaitu 10.58318, artinya jika semua variabel independen (Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Kriminalitas) diasumsikan konstan atau bernilai nol, maka besarnya tingkat variabel dependen (PDRB) antar 10 provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di negara Indonesia sebesar 10.58 persen.
- Nilai koefisien pengangguran yaitu -0.129243 maka bisa diartikan bahwa setiap terjadinya kenaikan Pengangguran maka PDRB di 10 provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi mengalami penurunan sebesar -0.12 persen.
- Nilai koefisien ketimpangan Pendapatan yaitu -0.912264 maka bisa diartikan bahwa setiap terjadinya kenaikan Ketimpangan Pendapatan maka PDRB di 10 provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi mengalami kenaikan sebesar 0.91 persen.

- d. Nilai koefisien kriminalitas yaitu -0.076027 maka bisa diartikan bahwa setiap terjadinya kenaikan kriminalitas maka PDRB di 10 provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi mengalami penurunan sebesar -0.07 persen.

Tabel 4. Hasil Path Analysis (Pengaruh Tidak Langsung I).

<i>Indirect Effect</i>	<i>t-Stat</i>	<i>Std.Error</i>	<i>Prob-value sobel test</i>
PGR-K-PDRB	1.359557	0.017906	0.17397

Sumber: *Eviews12, data diolah*

Berdasarkan Tabel 4, diketahui nilai probabilitas sobel sebesar 0.1739701 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sehingga H_0 diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh mediasi.

Tabel 5. Hasil Analisis Jalur Pengaruh Tidak Langsung II:

<i>Indirect Effect</i>	<i>t-Stat</i>	<i>Std.Error</i>	<i>Prob-value sobel test</i>
KP-K-PDRB	-1.997802	0.207939	0.045738

Sumber: *Eviews12, data diolah*

Tabel 5 menunjukkan nilai probabilitas sobel (0.04573809) atau lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga yang artinya adanya pengaruh mediasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar (-1.827845) dengan probabilitas sebesar 0.0706. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di Indonesia. Hasil ini berbeda dengan hipotesis penelitian. Penelitian dari Fachrurrozi et al. (2021); Septriani (2024) yang menyatakan bahwa Pengangguran ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Namun pada penelitian Apriani (2019) terjadinya penurunan pada pengangguran justru tidak berdampak pada penurunan tingkat kriminalitas. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan penjelasan dari Badan Pusat Statistik (2017) yang menyatakan bahwa pengangguran terdidik menyumbangkan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki pemikiran yang rasional sehingga kecil kemungkinannya masyarakat tersebut melakukan tindak kriminalitas, dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini pula yang menjadi alasan pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran di Indonesia pada tahun 2012-2021 tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kriminalitas di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar (3.960357) dengan probabilitas 0.0001, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Indonesia. Artinya, ketika ketimpangan

pendapatan naik, maka kriminalitas juga akan semakin meningkat, sebaliknya ketika ketimpangan pendapatan turun, maka kriminalitas juga akan turun atau dengan kata lain, semakin merata tingkat pendapatan masyarakat maka tingkat kriminalitas semakin berkurang. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Selain itu, dalam teori Becker (1968) dijelaskan bahwa kesenjangan pendapatan antar orang dengan pendapatan rendah dari sektor legal dengan orang yang ber harta tinggi disuatu daerah. Sehingga hal tersebut dapat memicu timbulnya tindakan kriminalitas akan naik di daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hairani Rs & Syahputri (2016) yang menjelaskan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas, sehingga jika ketimpangan pendapatan meningkat maka tingkat kriminalitas juga akan meningkat. Begitu juga pada penelitian Pratama (2020) yang menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan *Social disorganization Theory*, yang menyatakan bahwa tingkat kejahatan dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan ekonomi di sekitarnya mengemukakan bahwa karakteristik lingkungan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial, dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dalam wilayah tersebut. Mereka menyoroti peran faktor lingkungan dalam membentuk norma sosial, ikatan sosial, dan pola perilaku yang mungkin mendukung atau menentang tindakan kriminal. Teori ini memberikan pemahaman tentang kompleksitas interaksi antara individu, komunitas, dan lingkungan dalam mempengaruhi tingkat kejahatan (Shaw dan McKay, 1942).

Sementara itu, berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t-hitung sebesar (-2.004735) dengan probabilitas 0.0478. Hasil uji ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. Artinya, ketika pengangguran turun maka PDRB akan meningkat, sebaliknya ketika pengangguran meningkat, maka PDRB akan turun. Hasil regresi tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa turunnya tingkat pengangguran akan meningkatkan PDRB. Hasil tersebut senada dengan hipotesis, bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran. PDRB mencerminkan hasil output seperti pada hukum ohm menjelaskan output salah satu indikasi untuk melihat adanya kesempatan kerja. Kondisi peningkatan PDRB akan mendorong tersedia kesempatan kerja yang lebih banyak sehingga permintaan tenaga kerja meningkat maka pengangguran akan menurun. Hal tersebut menjelaskan peningkatan PDRB akan menurunkan pengangguran. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penemuan (Silaban et al., 2020) yang mengatakan bahwa Produk Domestik Riil Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran terbuka, begitupun dengan hasil temuan Sembiring & Sasongko (2019) PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2011-2017.

Selain itu, berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t -hitung sebesar (-4.570360) dengan nilai probabilitas 0.0000. Hal ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap PDRB di Indonesia. Artinya, semakin meningkatnya Ketimpangan Pendapatan akan menurunkan PDRB, dan sebaliknya ketika ketimpangan pendapatan turun, maka PDRB akan semakin meningkat. Adanya ketimpangan pendapatan masyarakat ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Rendahnya daya beli ini akan berdampak pada terhambatnya aktivitas perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Alesina & Rodrik (1994), hal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Kemudian berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t -hitung yaitu (-2.034075) dan probabilitas 0,04447, sehingga disimpulkan bahwa kriminalitas berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Hasil regresi tersebut sesuai dengan hipotesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya Kriminalitas akan menurunkan PDRB. Dalam hal ini, PDRB menjadi indikator penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial salah satunya kriminalitas. Menurut Khan et al. (2015), depresi ekonomi akan menyebabkan meningkatnya kriminalitas sedangkan kemakmuran ekonomi dapat menurunkan aktivitas kriminal. Sehingga ketika pertumbuhan ekonomi tersebut baik akan meningkatkan kesejahteraan seseorang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kesuma (2019) yang menjelaskan kejahatan memiliki dampak negatif terhadap PDRB. Kemudian, pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui kriminalitas (*variabel intervening*), yang artinya pengangguran secara tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB melalui kriminalitas (*variabel intervening*) di Indonesia tahun 2012-2021. Hal ini berbeda dari hasil penelitian Setiawan (2020), bahwa terdapat hubungan secara tidak langsung antara pengangguran dan kriminalitas pada PDRB. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Apriani (2019) dimana terjadinya penurunan pada

pengangguran tidak mengurangi tingkat kriminalitas yang ada. Menurut Septriani (2023b), terjadinya pengangguran ini sebagai akibat peningkatan angkatan kerja, namun disisi peningkatan angkatan kerja ini lebih cepat dari pada peningkatan kesempatan kerja. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan penjelasan dari Badan Pusat Statistik (2017) yang menyatakan bahwa pengangguran terdidik menyumbangkan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki pemikiran yang rasional sehingga kecil kemungkinannya masyarakat tersebut melakukan tindak kriminalitas, dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Dalam 10 provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia antara tahun 2012-2021, pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) melalui kriminalitas sebagai variabel perantara. Hasil ini mendukung pandangan bahwa faktor-faktor lain, seperti kebijakan ekonomi, investasi, dan sektor-sektor ekonomi tertentu, mungkin lebih dominan dalam memengaruhi PDRB daripada pengangguran yang berdampak pada tingkat kriminalitas. Meskipun demikian, Pemerintah diharapkan tetap meningkatkan aktivitas ekonomi guna mengatasi pengangguran. Menurut Kuncoro (2019), semakin banyak kegiatan ekonomi, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Hal ini diharapkan bahwa aktivitas ekonomi akan menyerap banyak tenaga kerja sementara mengurangi pengangguran (Irawan dan Suparmoko, 2006). Menurut Pardosi dan Septriani (2023), peningkatan aktivitas ekonomi akan mengurangi pengangguran, sehingga memungkinkan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya orang akan lebih banyak mendapatkan perkerjaan dan menghasilkan pendapatan. Selain itu, menurut Septriani (2023c) Penurunan kesejahteraan masyarakat karena pengangguran akan meningkatkan peluang mereka untuk terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Pengangguran akan mengakibatkan kekacauan sosial politik yang akan berdampak negatif pada perspektif dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran tinggi adalah masalah ekonomi karena sumber daya yang berharga tidak dimanfaatkan dengan baik (Septriani (2023d). Oleh karena itu, masalah pengangguran ini harus menjadi salah satu prioritas program yang harus diatasi oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori strain, dimana kriminalitas terjadi karena adanya ketegangan akibat adanya kesenjangan antara tujuan yang diinginkan dan kemampuan untuk mencapainya. Dalam teori ini, individu yang mengalami ketidakpuasan karena tidak dapat mencapai tujuan ekonomi yang dianggap penting dalam masyarakat, seperti keberhasilan finansial atau prestise, dapat merasakan

tekanan psikologis. Ketegangan ini yang kemudian mendorong mereka untuk mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk melalui tindakan kriminal.

Sementara itu, ketimpangan Pendapatan memiliki berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kriminalitas (*variabel intervening*). Hal tersebut menjelaskan jika meningkatnya pertumbuhan ekonomi namun semakin memperluas ketimpangan pendapatan yang disebabkan karena kesalahan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga kriminalitas akan meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Hasil ini senada dengan penelitian (Lahouij, 2017), bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang menyebabkan buruknya kesehatan masyarakat dan peningkatan tingkat kejahatan, yang semuanya memberikan beban pada perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa kemiskinan menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia, maka pemerintah harus mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Menurut teori lingkaran kemiskinan (*vicious cycle of poverty*), oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Luthfiah (2024), bahwa kemiskinan tidak mempunyai ujung dan pangkalnya. Kemiskinan dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan belanja pemerintah melalui kebijakan fiskal, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin. Di sisi lain, untuk meningkatkan distribusi pendapatan, pemerintah Indonesia juga dapat meningkatkan pajak dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

KESIMPULAN

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di Indonesia, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Indonesia, pengangguran berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia, ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap PDRB di Indonesia, kriminalitas memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB di Indonesia, pengangguran tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap PDRB melalui kriminalitas sebagai *intervening variable*, dan ketimpangan Pendapatan berpengaruh negatif terhadap PDRB melalui Kriminalitas sebagai *intervening variable*.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka pemerintah bisa mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan PDRB di Indonesia dengan cara menurunkan ketimpangan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *JSTOR*, 109(2), 465–490.
- [2] Apriani, R. (2019). *Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Andalas.
- [3] Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kriminal 2013-2022*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>
- [4] Basuni, L. E. N. (2019). *Pengaruh Kriminalitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 33 Provinsi Di Indonesia* [Skripsi, Universitas Airlangga]. <http://lib.unair.ac.id>
- [5] Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- [6] Clara Jennifer Munallag. (2023). Analisis Teori Kriminologi Strain dalam Kasus Balap Liar. *Jurnal UNES Law Review*. Volume 5, Issue 4 Juni 2023. Fakultas Hukum. Universita Negeri Semarang.
- [7] Deflem, M. (2017). Anomie, Strain, and Opportunity Structure: Robert K. Merton's Paradigm of Deviant Behavior. In *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*.
- [8] Dewantoro, D. M. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pdrb Perkapita, Pengangguran, Dan Upah Minimum, Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2020. *Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [9] Fachrurrozi, K., Fahmiwati, F., Hakim, L., Aswadi, A., & Lidiana, L. (2021). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Di Tahun 2019. *Jurnal Real Riset*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47647/jrr.v3i2.423>
- [10] Hairani Rs, P., & Syahputri, A. R. (2016). ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI PROPINSI SUMATERA UTARA. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i1.1018>
- [11] Irawan, dan Suparmoko. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- [12] Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial I* (p. 388). Rajagrafindo Persada.
- [13] Kesuma, D. A. (2019). Analisis Hubungan Tingkat Kejahatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.54783/jin.v1i3.416>
- [14] Khairani, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 4(2), Article 2.

-
- [15] Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The Socio-Economic Determinants of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate. *Arab Economic and Business Journal*, 10(2), 73–81. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2015.01.001>
- [16] Lahouij, H. (2017). The Effects of Income inequality on Economic Growth Evidence from MENA Countries. *2017 Awards for Excellence in Student Research and Creative Activity – Documents*. https://thekeep.eiu.edu/lib_awards_2017_docs/4
- [17] Luthfiah. 2024. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Kedalam Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2017-2022. *Jurnal Of Development Economics and Digitalization*. Vol 03 No. 1 Tahun 2024. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- [18] Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- [19] Okun, A. M. (1963). *Potential GNP: Its measurement and significance*. Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University.
- [20] Pardosi, A. Y., & Septriani, S. (2023). DETERMINATION FACTORS OF UNEMPLOYMENT IN BANTEN. *Jurnal Ekonomi*, 12(04), 2341-2347.
- [21] Pickett, K. E., James, O. W., & Wilkinson, R. G. (2006). Income inequality and the prevalence of mental illness: A preliminary international analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(7), 646–647. <https://doi.org/10.1136/jech.2006.046631>
- [22] Pratama, R. S. (2020). Pengaruh Pengangguran Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2007-2018. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- [23] Raharjo, A. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- [24] Robert D, C., George S, B., & Joseph G, W. (1996). *Crime: Readings (Sociology for New Century)*. SAGE Publications, Inc.
- [25] Robert K. Merton. (1968). *Robert K. Merton—Social Theory And Social Structure*. http://archive.org/details/robert_k_merton_social_theory_and_social_structure
- [26] Sarmiento, C., & Rudolf, R. (2017). The impact of childhood maltreatment on young adults' mental health: Evidence from the Philippines. *Asian Social Work and Policy Review*, 11, 76–89. <https://doi.org/10.1111/aswp.12115>
- [27] Sasana, H. (2009). PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA KONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.811>
- [28] Sembiring, V. B. P., & Sasongko, G. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21505>
- [29] Septriani, S. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1).
- [30] Septriani, S. (2023). Analysis Of The Effect Of Infrastructure And Population On The Economy Of Java Island. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 5(1), 73–83.
- [31] Septriani, S. THE IMPACT OF VILLAGE FUND ALLOCATION ON THE ECONOMIC OF BENGKULU PROVINCE, INDONESIA.
-

- [32] Septriani, S. (2023). ANALISIS FAKTOR DETERMINASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BENGKULU. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 83-92.
- [33] Septriani, S. (2024). The Impact of Economic Conditions on Criminality in Indonesia. *European Journal of Development Studies*, 4(3), 68-74.
- [34] Silaban, P. S. M. J., Sembiring, I. P. S. B., & Sitepu, V. A. B. (2020). Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v11i2.1077>
- [35] Simanjuntak, T. (2001). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [36] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12. ed). Pearson.